



RELASI INDONESIA- PALESTINA PADA MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

*Indonesian-Palestine Relations
In Susilo Bambang Yudhoyono's Government*

Anek Anrian
Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: anekanriani@gmail.com

***Abstract.** President Susilo Bambang Yudhoyon is a very important figure in enhancing diplomatic relations between Indonesia and Palestine. In the era of President Susilo Bambang Yudhoyon, relations between Indonesia and Palestine were increasingly harmonious because it showed that Indonesia played an important role in supporting Palestine to gain international recognition for its independence and also that the Indonesian people had provided various kinds of assistance to Palestine. This study uses diplomacy theory centered on the Middle East. According to Sumaryo Suryokusumo, the use of diplomacy theory is to explain how Indonesia's diplomacy excels in increasing reciprocal relations with other countries. This study aims to describe the relationship between Indonesia-Palestine foreign policy in the reform era under the administration of President SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) 2004-2014. Research then uses qualitative and descriptive approaches usually used in literature research by collecting various scientific sources including books, journals, articles, dissertations, theses and data from Google Chrome, Google Scholar, Library Genesis (Libgin), e-books and other data collected. deemed relevant and accountable.*

Keywords: Susilo Bambang Yudhoyono, Foreign Politics, Indonesia, Placetina

Abstrak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyon merupakan tokoh yang sangat penting dalam meningkatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina. Di era presiden Susilo Bambang Yudhoyon hubungan Indonesia dan Palestina semakin harmonis dikarenakan menunjukkan bahwa Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung Palestina mendapatkan pengakuan internasional untuk kemerdekaannya dan juga masyarakat Indonesia telah melakukan berbagai macam bantuan untuk Palestina. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi yang berpusat pada Timur Tengah. Menurut Sumaryo Suryokusumo kegunaan Teori diplomasi untuk memaparkan bagaimana keunggulan diplomasi Indonesia dalam meningkatkan hubungan dengan negara lain yang bertimbal balik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan Politik Luar Negeri Indonesia- Palestina pada era reformasi di bawah pemerintahan Presiden SBY



(Susilo Bambang Yudhoyono) 2004-2014. Penelitian kemudian menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif biasanya digunakan dalam penelitian literatur dengan mengumpulkan berbagai sumber ilmiah antara lain buku, jurnal, artikel, disertasi, tesis dan data dari *Google Chrome*, *Google Scholar*, *Library Genesis (Libgin)*, *e-book* dan data lainnya yang dianggap relevan dan di pertanggung jawabkan.

Kata Kunci: *Susilo Bambang Yudhoyono, Politik Luar Negeri, Indonesia, Plasetina*

ABSTRACT

President Susilo Bambang Yudhoyon is a very important figure in enhancing diplomatic relations between Indonesia and Palestine. In the era of President Susilo Bambang Yudhoyon, relations between Indonesia and Palestine were increasingly harmonious because it showed that Indonesia played an important role in supporting Palestine to gain international recognition for its independence and also that the Indonesian people had provided various kinds of assistance to Palestine. This study uses diplomacy theory centered on the Middle East. According to Sumaryo Suryokusumo, the use of diplomacy theory is to explain how Indonesia's diplomacy excels in increasing reciprocal relations with other countries. This study aims to describe the relationship between Indonesia-Palestine foreign policy in the reform era under the administration of President SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) 2004-2014. Research then uses qualitative and descriptive approaches usually used in literature research by collecting various scientific sources including books, journals, articles, dissertations, theses and data from Google Chrome, Google Scholar, Library Genesis (Libgin), e-books and other data collected. deemed relevant and accountal¹2.

Keyword: *Susilo Bambang Yudhoyono, Foreign Politics, Indonesia, Placetina*

PENDAHULUAN

Dalam kondisi jalinan internasional, peraturan luar negeri sesuatu negeri sering dipengaruhi oleh peraturan dalam negerinya. maksudnya tiap-tiap peraturan luar negeri yang dibentuk tidak bebas dari perspektif peraturan dalam negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan strategi kebijakan luar negeri yang didasarkan pada kebutuhan sistem politik dalam negerinya. Kebijakan luar negeri Indonesia didefinisikan oleh UUD 1945 sebagai politik bebas dan aktif. Bebas berarti tidak dibatasi oleh ide, politik, atau batasan negara lain. Aktif berarti bertindak aktif dalam merawat perdamaian bumi serta meningkatkan prinsip-prinsip kemandirian, kesetaraan serta kerjasama internasional dengan senantiasa menjamu kewenangan negeri lain. Prinsip leluasa aktif ini yaitu gairah perjuangan Indonesia guna meningkatkan kedudukannya dalam bidang internasional.



Salah satu bangsa yang Indonesia tujukan dalam perjuangan kemerdekaannya adalah Palestina. Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina sejak lama dan sering.¹

Hubungan Indonesia- Palestina sudah terjalin lama berdasarkan sejarahnya, Hubungan bisnis ini kemudian menjelma menjadi ikatan emosional, karena pihak agama (Islam) menyebabkan Indonesia mengalami nasib yang sama dan membantu negara Palestina atas dasar kepentingan Islam sebagai wujud solidaritas Islam.² Selain itu, Indonesia memiliki aset alami yang mirip, yaitu pembuat minyak, sehingga kemantapan politik dan keamanan di wilayah Timur Tengah merupakan keuntungan terbesar bagi Indonesia.³ Orang pertama di Timur Tengah yang mengumumkan kemerdekaan Indonesia di radio internasional adalah mufti Palestina Amin Al-Husain. Masyarakat internasional mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai hasil dari upaya Amin. Setelah berdirinya Kedutaan Besar Palestina di Indonesia pada 13 September 1993, hubungan bilateral antara Indonesia dan Palestina semakin membaik.⁴

Hubungan diplomatik telah terjalin antara Indonesia dan Palestina. terbukti Sejak 19 September 1993, dari penempatan sebagai Duta Besar Palestina untuk Indonesia. Selain Indonesia, Palestina adalah salah satu negara Timur Tengah dengan konflik terbanyak di dunia.⁵Indonesia, negara Muslim di luar Timur Tengah, memainkan peran strategis dalam menyelesaikan konflik Palestina melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif. Karena berbagai faktor internal dan eksternal, upaya diplomasi Indonesia di forum internasional saat ini dinilai belum efektif. Sebaliknya, Indonesia menggunakan diplomasi dalam proses

¹ Rezki Satris, "Perana Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestin Pasca Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel", *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, (2019): 161.

² M. Zein Hasan, *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 40,

³ Riza Sihbudi, *Indonesia-Timur Tengah, Masalah Dan Prospek*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 33-36

⁴ Muhammad Imam Noviar, "Kebijakan Luar Negeri Terhadap Konflik Palestina Pasca Agresi Israel Di Jalur Gaza (2018)", Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2015), 3.

⁵ Masyrofa, "Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia (Studi Diplomasi Pemerintahan Era Reformasi 1998-2018 Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Israel-Palestina)", Disertasi Konsentrasi Politik Islam Doktor Penkajian Islam Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2019), 3.



penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan menjadi anggota Negara dengan umat Islam terbanyak adalah OKI, atau Organisasi Kerjasama Islam.⁶

Di Indonesia juga ada anggapan bahwa setiap pendudukan, termasuk negara Israel, tidak merupakan keadilan dan kemanusiaan. Di karenakan, Indonesia sebagai negara di dunia ketiga yang mayoritas penduduknya beragama Islam menganut prinsip agama yang sama pada Palestina, yaitu Islam, dan melindungi Masjidil Aqsa yang merupakan bersejarah dan suci. Secara umum memiliki hubungan yang harmonis Indonesia dan Palestina, Indonesia melangkah maju dan membantu para korban serangan dan Upaya diplomasi Indonesia untuk membantu dan melindungi warga Palestina di Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara lain mendesak PBB untuk mengeluarkan pernyataan mengutuk serangan Israel dan mengeluarkan resolusi terhadap Israel atas serangan tersebut, serta Indonesia mengirimkan bantuan medis dan tim dokter untuk merawat korban-korban yang diserang oleh Israel.⁷ Misalnya, dukungan tanpa syarat bagi Indonesia demi perjuangan masyarakat Palestina demi merdeka dari Israel yang menguasai sebagian wilayahnya.

Penjajahan harus diberantas di muka bumi sesuai aturan pembukaan UUD 1945 mengatakan bahwa semua bangsa berhak untuk merdeka. Alhasil, Indonesia akan selalu mendukung dan membantu perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat, bahkan setelah Presiden Soekarno lengser.⁸ Saat ini, membela, mendukung, dan mendeklarasikan kemerdekaan Palestina setara dengan menjunjung tinggi keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan atas nama semua bangsa, termasuk bangsa Palestina.⁹ Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina terbukti diperkuat dengan perannya dalam sikap kebijakan luar negeri terhadap kemerdekaan Palestina pada era reformasi Susilo

⁶ *Ibid.*, 1.

⁷ Muhammad Imam Noviar, "Kebijakan Luar Negeri Terhadap Konflik Palestina Pasca Agresi Israel Di Jalur Gaza (2018), Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Uin Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2015), 2.

⁸ Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 75.

⁹ *Ibid.*, 99.



Bambang Yudhoyono (2004-2014). SBY sering terlibat aktif dengan duta besar Palestina dan aktif mencari solusi atas konflik Israel-Palestina.¹⁰

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Susilo Bambang Yudhoyono adalah pemimpin Indonesia yang tak terbantahkan dalam kebijakan luar negeri, dengan mengandalkan minat dan keahliannya dalam bidang tersebut, reformasi kelembagaan, dan dinas militer, untuk mempertahankan kendali penuh atas mesin kebijakan luar negeri yang sebelumnya tidak praktis. Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan minat pada kebijakan luar negeri sepanjang karir militernya yang panjang. Di awal masa kepresidenannya, dia mulai menjadi negarawan global dan pakar kebijakan luar negeri. Selama masa jabatan pertamanya, ia merumuskan kembali konsep Indonesia tentang posisinya dalam sistem internasional sebagai negara dengan "seribu teman dan tanpa musuh" dan "kebijakan luar negeri yang menyeluruh". Dia menolak permintaan legislatif dan birokrasi untuk penyelesaian sengketa yang lebih keras. Selain itu, Susilo Bambang Yudhoyono bertanggung jawab atas reformasi kelembagaan yang memudahkan Kementerian Luar Negeri dan Istana Negara untuk mengambil keputusan tentang politik luar negeri. Alhasil, TNI dan Kementerian Luar Negeri tidak lagi saling bersaing di bidang ini.¹¹

Latar belakang tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait dari judul penelitian ini, yaitu *"Hubungan Politik Luar Negeri Indonesia- Palestina Pada Masa Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) 2004-2014"*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teori diplomasi yang berpusat pada Timur Tengah. Menurut Sumaryo Suryokusumo Teori diplomasi untuk memaparkan bagaimana keunggulan diplomasi Indonesia dalam meningkatkan hubungan dengan negara lain yang bertimbang balik. Sedangkan, Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka yang mana

¹⁰ Masyarofah, "Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia (Studi Dipolimasi Pemerintah Era Reformasi 1998-2018 Dalam Uapaya Penyelesaian Konflk Israel-Palestina)", 15.

¹¹ Aaron L. Connelly, "Indonesian Foreign Policy Under President Jokowi", *Lowy Institute for International Policy*, (2014), Stable URL: <http://www.jstor.com/stable/resrep10156>, 2-3.



Pendekatan kualitatif dan deskriptif biasanya digunakan dalam penelitian literatur. Dengan melakukan berbagai kajian literatur yang relevan, metode ini menghasilkan data deskriptif sebagai prosedur penelitian. Sumber kajian ini yakni buku-buku yang berkaitan dengan Hubungan Politik luar negeri Indonesai, baik dari jurnal, artikel, tesis, disertasi dan data-data dari Google Chroom, Google Scholar, Library Genesis (Libgin), E-Book, dan data-data lain yang dianggap kompeten dan akuntabel. Setelah sumber data untuk penelitian ini terkumpul, peneliti mulai membaca, menganalisis, dan kemudian mengkategorikan sumber-sumber penting sehingga masalah penelitian dapat dengan mudah dianalisis.

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Sejarah Kemerdekaan Palestina

Palestina adalah negara kecil di tenggara Laut Mediterania. Suriah dan Libanon berbatasan dengannya di utara. Sinai membentuk perbatasan selatan Palestina. Laut Mediterania terletak di sebelah barat Palestina, dan Irak serta Arab Saudi terletak di sebelah timurnya.¹² Antara 1000 dan 586 SM, Palestina adalah negara Yahudi merdeka yang merupakan koloni Romawi (63 sebelum 636 M). Khalifah Umar Bin Khattab berhasil menduduki Palestina pada tahun 636, dan mayoritas penduduk disana memeluk Islam. Palestina diperintah oleh Kesultanan Utsmaniyah dari tahun 1517 hingga 1917. Seluruh Kesultanan Utsmaniyah, termasuk Palestina, diambil alih oleh Sekutu setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama (Turki bergabung dengan Jerman). Akibatnya, Palestina diperintah oleh Inggris dari tahun 1917 hingga 1948.

Palestina dibagi menjadi tiga bagian antara tahun 1948 dan 1949 selama perang Arab-Israel pertama. Pertama, Galilea, wilayah pesisir (dengan pengecualian kantong Negeb El-Auja dan Jalur Gaza), dan koridor besar yang menghubungkan dataran rendah pesisir ke kota baru Darussalam adalah bagian dari wilayah Israel. Kedua, Jalur

¹² Kirdi Dipoyudo, *Timur Tengah Dalam Pergolakan*, (Jakarta: CSIS, 1982), 96-97.



Gaza di bawah pemerintahan pendudukan Mesir dengan luas 202 km². Ketiga, Jordan Barat, termasuk wilayah Transyordania yang diduduki yang kemudian menjadi bagian dari wilayah Yordania. Tepi Barat dan Jalur Gaza diambil alih oleh Israel dan ditempatkan di bawah kendalinya selama Perang Arab-Israel pada tahun 1967.¹³ Meski tidak memiliki kekuatan, nasionalisme Palestina masih hidup dan tumbuh perlahan, terutama sejak pemimpin dari mereka yang memulai. Gerakan nasional Palestina telah berkuasa. Orang-orang Palestina yang diasingkan membentuk sejumlah kelompok perlawanan dengan berbagai nama, memberikan bukti. Pendirian negara Palestina adalah tujuan dari semua hingga lima belas nama organisasi perlawanan Palestina. Hanya Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dianggap sebagai perwakilan resmi Arab Palestina di antara banyak organisasi. Para pemimpin Arab mendirikan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada tahun 1964 dengan maksud memperoleh kendali atas sejumlah kelompok perlawanan Palestina.¹⁴

PLO terlibat dalam politik dan militer untuk mencapai tujuannya. Di bidang politik, upaya dilakukan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa perjuangan bangsa Arab Palestina adalah perang pembebasan nasional yang didukung oleh negara-negara Arab dan negara-negara lain, khususnya PBB. PLO sedang mempersiapkan rakyat Palestina untuk revolusi dengan mengobarkan perang gerilya melawan Israel di front militer. PLO berkembang setelah dan selama perang tahun 1967. Para pemimpin Palestina terbujuk oleh kekalahan total tentara Arab bahwa hanya rakyat mereka sendiri yang dapat menyelesaikan masalah Palestina. Aktivitas gerilya melawan Israel meningkat. Begitu pula dengan gengsi, popularitas dan kekuatan gerilyawan. Namun karena bentrokan dengan pemerintah Yordania dan Lebanon serta perpecahan di PLO, ini tidak berarti banyak dari sudut pandang militer.¹⁵

¹³ Ismawati, *Sejarah Timur Tengah Sejarah Asia Barat Dari revolusi Libya Sampai Revolusi Melati*, (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI, 2018), 75-76.

¹⁴ Riza Shibudi, *Indonesia Timur Tengah Masalah Dan Prospek*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 73-74.

¹⁵ Saibatul Aslamiah, "Diplomasi Indonesia Dalam Mendukung Palestina Menjadi Negara Peninjau Di PBB Tahun 2012", *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 2, No, 2, (Oktober, 2015): 6-7.

Lemah secara militer namun maju secara strategis. Orang-orang Arab Palestina yang sebelumnya dianggap sebagai pengungsi, diakui sebagai sebuah bangsa oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1969. Perjuangan orang-orang Arab Palestina diakui sah oleh PBB pada tahun 1971, dan negara-negara lain diminta memberikan bantuan politik, dukungan moril, dan material. Majelis Umum PBB akhirnya menyepakati pada 22 November 1974, bahwa rakyat Palestina berhak bernegara dan kembali ke Palestina. PBB bahkan memberikan PLO status pengamat tetap di Majelis Umum yang disponsori PBB dan konferensi internasional di bawah kepemimpinan Yasser Arafat. Teks pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

"Dengan ini kami mendeklarasikan berdirinya negara Palestina untuk rakyat Palestina, dengan kota suci Yerusalem sebagai ibu kotanya, atas nama Tuhan dan atas nama rakyat, rakyat Arab Palestina."

Deklarasi tersebut adalah deklarasi bersejarah dan penting karena didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 242 dan 338 mengakui kedaulatan semua negara di zona perang pada tahun 1967. deklarasi yang mengakui keberadaan Israel sebagai negara Zionis. Dua puluh negara asing segera mendukung deklarasi negara Palestina, termasuk Indonesia. Kecuali Amerika Serikat dan Israel, yang telah menyatakan penentangan terbuka mereka terhadap deklarasi tersebut, hampir semua negara Barat belum memberikan tanggapan, jadi ini hanya langkah sederhana. karena Israel terus menduduki tepi Barat dan Jalur Gaza yang dinyatakan sebagai wilayah sementara negara Palestina yang merdeka dari Israel, perjuangan rakyat Palestina belum berakhir.¹⁷

Perpecahan tajam antara elit politik Israel, negara-negara Arab, dan Arab Palestina sendiri menjadi faktor lain yang mempersulit perjuangan dan penyelesaian masalah Palestina. Sekelompok pemimpin moderat Israel yang terkenal dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Shimon Peres dan diwakili oleh Partai Buruh. Selain itu, ada kelompok sayap kanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Yitzhak Shamir dan

¹⁶ Kirdi Dipoyudo, *Timur Tengah Dalam Pergolakan*, 123-124.

¹⁷ Riza Shibudi, *Indonesia Timur Tengah Masalah Dan Prospek*, 82.

diwakili oleh partai Likud. Rabi Meir Kahane juga mewakili kelompok sayap kanan. Ketiga kelompok tersebut memiliki perspektif yang berbeda mengenai wilayah Palestina di bawah masa depan pendudukan Israel. Secara teori, Partai Buruh bersedia menyerahkan Gaza dan Tepi Barat untuk membangun perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Di sisi lain, partai Likud dan Kach ingin bergabung dengan negara Israel dan menyatukan Gaza dan Tepi Barat. Meski sejumlah perundingan telah dilakukan, namun sulit untuk menemukan solusi atas masalah Palestina yang dapat disepakati semua orang. Namun, masih sering terjadi konflik antara Israel dan Palestina, dan jalan menuju Perdamaian Timur Tengah, terutama antara Israel dan Palestina, masih terlalu panjang.¹⁸

2. Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Palestina

Diplomasi Seperti yang kita semua tahu, diplomasi berfokus pada Timur Tengah. Teori diplomasi menjelaskan bagaimana upaya diplomasi Indonesia untuk meningkatkan hubungan dengan negara lain bersifat timbal balik. Sumaryo Suryokusumo mengatakan bawah diplomasi adalah bagian penting dari kehidupan bangsa dan alat terpenting untuk memecahkan masalah internasional untuk mencapai perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuannya dan mendapatkan dukungan untuk standar yang dipertahankannya, negara berpartisipasi dengan bijaksana. Proses politik diplomasi bertujuan untuk menegakkan kebijakan luar negeri suatu pemerintah dan mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah lainnya.¹⁹ Suryokusumo memaparkan, diplomasi mencakup banyak aspek. Salah satunya adalah tindakan multilateral, atau strategi antara setidaknya tiga negara. Karena biasanya berlangsung selama konferensi bilateral, diplomasi multilateral juga dikenal sebagai diplomasi konferensi.²⁰

Pelaksanaan strategi internasional Indonesia mencerminkan kebijaksanaan yang mencakup semua komponen negara untuk mencapai keuntungan publik Indonesia,

¹⁸ Ismawati, *Sejarah Timur Tengah Sejarah Asia Barat Dari revolusi Libya Sampai Revolusi Melati*, 86-89.

¹⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Praktik Diplomasi*, (Jakarta: Bp Iblam, 2004), 1.

²⁰ *Ibid*, 59.



sambil terus mengambil bagian yang berfungsi dalam upaya membangun kerukunan dan keamanan dunia di tingkat dua sisi, provinsi dan dunia. Indonesia memimpin secara global dalam berbagai isu multilateral, termasuk: kontraterorisme, memerangi kejahatan transnasional terorganisir, tujuan pembangunan milenium, hak asasi manusia, ekspresi budaya, pengetahuan tradisional, perlindungan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, reformasi PBB, dan GNB (Gerakan Non-Blok) hanyalah beberapa masalah yang perlu ditangani. Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Palestina, dan kerjasama Selatan-Selatan adalah kemajuan penting telah dicapai terutama di bidang pembagian senjata, yaitu dalam negosiasi zona bebas senjata nuklir di Asia Tenggara antara negara-negara mitra ASEAN dan negara-negara pemilik senjata nuklir, dan dalam ratifikasi CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty).²¹

Faktor internal mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Faktor internal dari setiap kebijakan luar negeri Indonesia dari tahun 1945 hingga 2007 menunjukkan hal tersebut. Salah satu negara yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina adalah Indonesia. Bangsa-bangsa ini memiliki sejarah yang berawal dari masa awal kemerdekaan Indonesia, dan diplomasi dimulai di Mesir dan Palestina untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Syaikh Muhammad Amin Al-Husain, Mufti Palestina, menyambut baik dan mendukung delegasi Indonesia ke negara-negara Timur Tengah. Dia kemudian membantu Indonesia melobi negara-negara Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Sampai saat itu, Mesir yang awalnya merasakan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947, kemudian diikuti oleh bangsa Badui lainnya setelah otonomi Indonesia, Indonesia secara konsisten menentang penguasaan Israel atas Palestina. Pada Januari 1950, Israel mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi Indonesia tetap menolak kemerdekaan Israel. Indonesia mengakui keberadaan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang didirikan pada tahun 1947 oleh Yasser Arafat sebagai sekutu internasional rakyat Palestina. Pada tanggal 15 November 1988,

²¹ Rezki Satris, "Perana Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestin Pasca Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel", 163.



Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya di Aljazair, ibu kota negara. Pada 16 November, Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina dan mengakui kemerdekaan Palestina.

Sementara negara Palestina berada di bawah pendudukan, Indonesia menolak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Tahun 1991 menandai pembukaan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Pada tahun 1993, Presiden Palestina, Yasser Arafat, berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Soeharto. Setelah Hamas memenangkan pemilu pada tahun 2006, Indonesia menghormati keputusan rakyat Palestina untuk mengadakan pemilu yang demokratis dan mendesak negara-negara Barat yang menentang hasil pemilu untuk membuka perbatasan mereka dengan Hamas. Kali kedua Presiden Palestina Mahmoud Abbas berkunjung ke Indonesia untuk urusan bisnis adalah pada tahun 2007 dan 2010. Tujuannya adalah untuk meminta Indonesia membantu menghidupkan kembali proses perdamaian dan mengupayakan rekonsiliasi internal Palestina, khususnya antara Fatah dan Hamas. Tujuan kedua belah pihak adalah menemukan cara untuk membebaskan warga Palestina.²²

ANALISIS

Hubungan Politik Luar Negeri Indonesia- Palestina Pada Era Reformasi Di Bawah Pemerintahan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) 2004-2014

Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disapa SBY diperkenalkan sebagai Pemimpin Republik Indonesia ke-6 pada 20 Oktober 2004. SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih oleh semua orang. Sejak 2004 hingga 2009, ia menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia bersama Jusuf Kalla. Pada tahun 2009 Boediono terpilih sebagai wakil presiden, sedangkan SBY terpilih kembali sebagai presiden pada tahun 2009. Kebijakan luar negeri Indonesia pada era SBY mampu melibatkan Indonesia secara aktif di kancah internasional pada tahun 2006. Indonesia telah terpilih menjadi anggota Dewan

²² Saibatul Aslamiah, "iplomasi Indonesia Dalam Mendukung Palestina Menjadi Negara Peninjau Di PBB Tahun 2012", 7-8.



HAM PBB. Mantan Presiden RI Keenam ini menyampaikan terima kasih atas kepercayaan anggota PBB pada Forum MPR RI untuk menjadi motor penggerak Indonesia untuk melanjutkan upaya reformasi yang sedang berjalan, termasuk memperkuat stabilitas dan pertumbuhan. Tentang penghormatan hak asasi manusia (HAM), penegakan hukum, dan demokrasi.²³

Penghormatan HAM bukan hanya dari negara ke rakyatnya, tapi harapan presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga antar warga negara Indonesia, antar bangsa. Indonesia harus bisa menjadi panutan bagi negara lain agar Indonesia bisa menghargai kebebasan bersama di kemudian hari. Terakhir, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masa jabatan 2007-2008, yang dimulai pada 1 Januari 2007 dan berakhir pada 31 Desember 2008. dalam pemilihan yang diselenggarakan pada Sidang Umum PBB di New York. Sanga Panggabean melaporkan kepada PBB di New York bahwa Indonesia memperoleh 158 suara dari 192 anggota umum. Pertemuan “Penunjukan Indonesia sebagai individu non-super durable dari UN Security Gathering membuka pintu yang lebih luas bagi Indonesia untuk berperan serta dalam mewujudkan keamanan dan keharmonisan dunia baik di dalam maupun di luar Dewan Keamanan PBB.²⁴

Indonesia mengejar politik luar negeri bebas dan aktif di bawah kepemimpinan SBY. Salah satu aspek politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh negara. Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel didukung oleh mayoritas umat beragama. Namun, keputusan politik tidak boleh didasarkan pada kesamaan identitas agama. Kebijakan luar negeri Indonesia didasarkan pada amanat konstitusi. Konsekuensinya, politik luar negeri Indonesia bersifat aktif dan terbuka. Salah satu upaya Indonesia untuk mencapai perdamaian dunia adalah dukungannya terhadap Palestina sebagai negara berdaulat.²⁵ karena perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan

²³ Ahmad Yani Basuki, *Jalan Harus Terang: Sisi Religius SBY Dalam Gaduhnya Politik*, Sahrudi (ed.). (Jakarta: Gramedia, 2015), 290.

²⁴ Yumetri Abidin, *Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia*, Zikri Neni Iska (ed.). (Jakarta: Unas Press, 2019), 215.

²⁵ Fardhal Virgiawan Ramadhan, “Kebijakan Politik Luar Negeri Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Pertahanan Negara”, dalam



Palestina adalah salah satu yang paling maju di dunia. Mentalitas di Indonesia ini merupakan perintah dari konstitusi negara, dimana Indonesia menolak imperialisme. Bangsa mayoritas Muslim di dunia, Indonesia, sangat mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam sejumlah organisasi internasional, antara lain Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB) yang menaruh perhatian khusus pada konflik antara Israel dan Palestina. Oleh karena itu, Indonesia harus menunjukkan komitmennya untuk mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Salah satunya menggalang dukungan untuk memperkuat status Palestina di PBB.²⁶

Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, hubungan Indonesia dan Palestina sangat harmonis. Pada tahun 2008, Menlu Asia Afrika diundang oleh Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda. Dengan mempertimbangkan NAASP, itu dibuat. Dukungan terhadap Palestina sebagai negara yang berdaulat dan merdeka menjadi topik perbincangan di konferensi NAASP. Untuk meningkatkan kemampuan NASSP, Indonesia dan Palestina sepakat melatih 1.000 kader Palestina. Semuanya dimulai pada 2008 ketika pemimpin PLO Mahmoud Abbas muncul di Forum Demokrasi Bali. Sejak tahun 2008 hingga 2013, Indonesia dan Palestina memiliki hubungan bilateral yang mencakup bidang ekonomi, peningkatan kapasitas, diplomasi, dan politik.²⁷

Indonesia juga berkontribusi dalam pembangunan bank dan rumah sakit berbasis syariah di Jalur Gaza. Bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Jalur Gaza diberikan oleh beberapa organisasi dan komunitas Indonesia. Mehdaw menyadari reformasi kebijakan luar negeri itu nyata dan belum pernah terjadi sebelum SBY berkuasa. Mehdaw juga diakui sebagai aksi tulus untuk Palestina berkat dukungan dan bantuan rakyat Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyelenggarakan pelatihan bagi

https://www.academia.edu/39539990/KEBIJAKAN_POLITIK_LUAR_NEGERI_PADA_MASA_PEMERINTAHAN_SUSILO_BAMBANG_YUDHOYONO_DALAM_PERTAHANAN_NEGARA, diakses 19 Desember 2022.

²⁶ Saibatul Aslamiah, "iplomasi Indonesia Dalam Mendukung Palestina Menjadi Negara Peninjau Di PBB Tahun 2012", 3.

²⁷ Muhammad Imam Noviar, "Kebijakan Luar Negeri Terhadap Konflik Palestina Pasca Agresi Israel Di Jalur Gaza (2018), 60.



warga Palestina untuk mendukung kemitraan strategis NAASP. Pada tahun 2008, pusat pelatihan Kementerian Luar Negeri Indonesia memberikan pelatihan diplomatik kepada sepuluh pejabat tingkat menengah Palestina. Pada tahun 2009, lima duta besar Palestina juga mengikuti pelatihan diplomasi tingkat tinggi. Lima pejabat senior Palestina juga mengikuti pelatihan protokoler dan pelatihan peningkatan kapasitas di Pusdiklat. Selain itu, 5 orang Palestina pergi ke bahasa Indonesia mempersiapkan waktu yang lama dan selanjutnya di Walk 2010, persiapan diskresioner tingkat Junior.²⁸

Kementerian Luar Negeri RI memberikan pendidikan berupa pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, tidak hanya dari segi politik, untuk mendorong kemandirian ekonomi bagi rakyat Palestina. Menurut Mehdaw, Presiden SBY sangat kuat dalam mengelola pemerintahan Palestina. Selain itu, SBY memahami lanskap politik internasional yang mencerminkan kepemimpinannya yang mantap dalam kebijakan luar negeri pemerintahannya.²⁹ Pada masa awal berdirinya organisasi Presiden SBY, tahun 2006, SBY berkunjung ke Mehdaw dan menanyakan bantuan apa yang dibutuhkan Palestina dari Indonesia. Mehdaw mengatakan bahwa tindakan membantu Palestina ini sangat berkesan dan tulus. Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina cukup aktif di forum internasional sejak pertemuan itu, mengadvokasi perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Di kancah dunia, Indonesia secara efektif ikut andil dalam tujuan perjuangan Palestina-Israel.

Sejak 2011, Indonesia mendukung upaya menjadikan Palestina sebagai negara non-PBB. Pada 23-27 Maret 2011, Indonesia mengusulkan voting Palestina menolak keanggotaan PBB di Bali. Melalui "Komite Menteri GNB-Gerakan Non Blok", GNB mengumpulkan suara untuk mengakui Palestina sebagai anggota PBB, mendukung gagasan Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengumumkan bahwa negaranya masih mendukung berdirinya Palestina. Indonesia juga mengirimkan

²⁸ *Ibid.*, 60.

²⁹ KJRI Jeddah, "Indonesia Galang Dukungan untuk Palestina Melalui Pertemuan Luar Biasa OKI", *Pemerintahan Luar Negeri Republik Indonesia*, dalam <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3556/berita/indonesia-galang-dukungan-untuk-palestina-melalui-pertemuan-luar-biasa-oki>, diakses 19 desember 2022.

relawan dari MER-C, KISPA (Komite Solidaritas Palestina Indonesia), dan PMI, selain dukungan dan bantuan yang telah dijelaskan. Tim Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) adalah salah satunya, dan cepat membantu korban konflik dan bencana domestik dan internasional. Warga Palestina di Jalur Gaza termasuk di antara mereka yang menerima tanggapan dari kelompok ini. Israel menyerang Jalur Gaza pada akhir 2008, menewaskan ribuan warga Gaza.³⁰

Pembangunan Rumah Sakit Indonesia (RSI) merupakan kontribusi terbesar MER-C untuk Gaza. Seluruh masyarakat Indonesia khususnya MER-C yang telah bekerja keras menggalang dana untuk penyelesaian rumah sakit merasa bangga atas donasi ini. Tim MER-C termotivasi untuk membantu korban kemanusiaan dengan keadaan akibat konflik di Gaza. Indonesia berperan penting dalam memberikan bantuan kepada Palestina. *Pertama*, bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Warga Gaza hidup dalam kemiskinan dan kelaparan yang lebih besar sebagai akibat dari konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung, khususnya di Jalur Gaza. karena berakhirnya bantuan ke Gaza dan blokade Israel. Relawan dari MER-C, KISPA (Komite Solidaritas Palestina Indonesia), dan PMI (Palang Merah Indonesia) sangat antusias memberikan bantuan kemanusiaan di ruang ini.³¹

Kedua, keharmonisan antara Hamas dan Fatah. Para pemimpin Fatah dan Hamas memiliki hubungan yang relatif baik dengan Indonesia. Alhasil, Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong Fatah dan Hamas untuk membentuk pemerintahan baru di Palestina pada awal Februari 2012 yang didukung oleh pemerintah Qatar. Pada tahun 2006, ketika Hamas memenangkan pemilihan parlemen, ketegangan antara Fatah dan Hamas mencapai titik tertingginya. *Ketiga*, penentuan nasib sendiri Palestina. Indonesia ingin mengakui Palestina sebagai negara berdaulat karena merupakan

³⁰ Medical Emergency Rescue Committee, "MER-C, Wujudkan Peranan Masyarakat Indonesia Peduli Palestina", dalam <https://mer-c.org/berita-media/mer-c-wujud-nyata-peranan-masyarakat-indonesia-peduli-palestina>, diakses 19 Desember 2022.

³¹ Medical Emergency Rescue Committee, "MINA dan MER-C Hadirkan Relawan RS Indonesia Di Gaza Palestina Sampaikan Situasi Terkini", dalam <https://mer-c.org/berita-media/mina-dan-mer-c-hadirkan-relawan-rs-indonesia-di-gaza-palestina-sampaikan-situasi-terkini>, diakses 19 Desember 2022.



bangsa yang menjunjung tinggi cita-cita antikolonial, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pemerintah Indonesia akan membuka kedutaan baru di Palestina sebagai langkah awal, yaitu tanda yang jelas bahwa ia ingin menjadikan Palestina sebagai negara. Pemerintah Indonesia hingga saat ini menggabungkan struktur kedutaan untuk Yordania dan Palestina di bawah Kementerian Luar Negeri.

Keempat, diplomasi dalam skala global. Indonesia akan terus berupaya keras untuk membantu Palestina menjadi anggota penuh PBB. Notifikasi Indonesia atas pertemuan OKI (Organization of Islamic Cooperation) 2012 di Palembang adalah salah satu upaya tersebut. Indonesia juga aktif mendorong negara lain untuk mendukung upaya Palestina bergabung dengan 192 negara anggota PBB dikatakan oleh Mahmud Abbas bawah keinginan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB dalam pidatonya di Majelis Umum PBB tahun lalu. Abbas juga meminta agar masalah Palestina dibahas di Dewan Keamanan PBB dalam surat resmi kepada Ban Ki-moon, sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Permintaan Palestina akan dikabulkan sedemikian rupa jika disetujui oleh sembilan dari lima belas orang dari Dewan Keamanan dan tidak dihalangi oleh orang-orang yang sangat tangguh dari Majelis Keamanan PBB.³²

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, yang meliputi kemerdekaan dan kedaulatan negara, mengutamakan kepentingan rakyat, dan upaya mewujudkan perdamaian dunia. Bebas berarti tidak dibatasi oleh politik atau ideologi bangsa atau kelompok bangsa lain. Aktif mengacu pada tindakan aktif untuk menghormati kedaulatan negara lain dan untuk mempromosikan persahabatan, kerjasama internasional dan kebebasan.

³² Muhammad Imam Noviar, "Kebijakan Luar Negeri Terhadap Konflik Palestina Pasca Agresi Israel Di Jalur Gaza (2018), 64-65. Lihat; Muhammad Akhyar Marpaung, Christine Sri Manarni, Mhd Halkis, 2020, Indonesia's Defense Diplomacy through the United States: Case Study of Cooperation a Float Readiness and Training (CARAT) 2019 Joint Exercise



Indonesia mengejar politik luar negeri bebas dan aktif di bawah arahan SBY. Keadaan dalam negeri berdampak pada salah satu kebijakan Indonesia. Strategi pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel mendapat dukungan agama dari mayoritas masyarakat Indonesia. Politik, di sisi lain, tidak dapat dibangun di atas identitas agama yang sama. Landasan politik luar negeri Indonesia adalah amanat konstitusi. Itulah sebabnya politik luar negeri Indonesia bersifat terbuka dan aktif. Bantuan Indonesia kepada Palestina sebagai negara berdaulat sangat dibutuhkan untuk menciptakan keharmonisan dunia. Karena Indonesia kemungkinan besar adalah negara paling istimewa yang memperjuangkan otonomi Palestina. Sikap ini didasarkan pada amanat konstitusi Indonesia bahwa negara Indonesia melawan penjajahan. Sebagian besar umat Islam dunia, masyarakat Indonesia, memiliki simpati yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Indonesia mendorong Palestina menjadi negara merdeka dan aktif memberikan bantuan kemanusiaan. Batu-batu inilah yang membuat Indonesia dan Palestina tetap terhubung hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Yumetri. *Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia*, Zikri Neni Iska (ed.). Jakarta: Unas Press, 2019.
- Basuki, Ahmad Yani. *Jalan Harus Terang: Sisi Religius SBY Dalam Gaduhnya Politik*, Sahrudi (ed.). Jakarta: Gramedia, 2015.
- Daman, Rozikin. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Dipoyudo, Kirdi. *Timur Tengah Dalam Pergolakan*. Jakarta: CSIS, 1982.
- Hasan, M. Zein. *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Ismawati. *Sejarah Timur Tengah Sejarah Asia Barat Dari revolusi Libya Sampai Revolusi Melati*. Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2018.
- Sihbudi, Riza. *Indoensia-Tiimur Tengah, Masalah Dan Prospek*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Praktik Diplomasi*. Jakarta: Bp Iblam, 2004.



Jurnal dan Artikel Daring

Aslamiah, Saibatul. "Diplomasi Indonesia Dalam Mendukung Palestina Menjadi Negara Peninjau Di PBB Tahun 2012". *Jurnal Jom Fisip*. Vol. 2, No. 2. (Oktober, 2015).

Committee, Medical Emergrncy Rescue. "MINA dan MER-C Hadirkan Relawan RS Indonesia Di Gaza Palestina Sampaikan Situasi Terkini". Dalam <https://mer-c.org/berita-media/mina-dan-mer-c-hadirkan-relawan-rs-indonesia-di-gaza-palestina-sampaikan-situasi-terkini>. Diakses 19 Desember 2022.

_____. "MER-C, Wujudkan Peranan Masyarakat Indonesia Peduli Palestina". Dalam <https://mer-c.org/berita-media/mer-c-wujud-nyata-peranan-masyarakat-indonesia-peduli-palestina>. Diakses 19 Desember 2022.

Connelly, Aaron L. "Indonesian Foreign Policy Under President Jokowi", *Lowy Institute for International Policy*, (2014), Stable URL: <http://www.jstor.com/stable/resrep10156>.

Jeddah, KJRI. "Indonesia Galang Dukungan untuk Palestina Melalui Pertemuan Laur Biasa OKI". *Pemerintahan Luar Negeri Republik Indonesia*. Dalam <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3556/berita/indonesia-galang-dukungan-untuk-palestina-melalui-pertemuan-luar-biasa-oki>. Diakses 19 desember 2022.

Marpaung, Muhammad Akhyar Christine Sri Manarni, Mhd Halkis, 2020, Indonesia's Defense Diplomacy through the United States: Case Study of Cooperation a Float Readiness and Training (CARAT) 2019 Joint Exercise, *The International Journal of Humanities & Social Studies*,

Masyarofah. "Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia (Studi Dipolimasi Pemerintah Era Reformasi 1998-2018 Dalam Uapaya Penyelesaian Konflk Israel-Palestina)". Disetasi Konsentrasi Politik Isalam Doktor Penkajian Islam Pascasarjana Uin Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2019.

Noviar, Muhammad Imam. "Kebijakan Luar Negeri Terhadap Konflik Palestina Pasca Agresi Israel Di Jalur Gaza (2018)". Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2015.



Ramadhan, Fardhal Virgiawan. "Kebijakan Politik Luar Negeri Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Pertahanan Negara". Dalam https://www.academia.edu/39539990/KEBIJAKAN_POLITIK_LUAR_NEGERI_PADA_MASA_PEMERINTAHAN_SUSILO_BAMBANG_YUDHOYONO_DALAM_PERTAHANAN_NEGARA. Diakses 19 Desember 2022.

Satris, Rezki Satris. "Perana Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel". *Jurnal Pemikiran Politik Islam*. Vol. 2, No. 2, (2019).